BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimasa pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yaitu musyawarah media dengan disnaker, mediasi hukum, perjanjian bersama dan memberi pesangon. Selanjutnya uang diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar salah satu pihak tidak dirugikan.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19, terbagi menjadi 2. Pertama perlindungan dari perusahaan yaitu adanya kompensasi melalui pembayaran uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja. Kedua dari pemerintah Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemic Covid-19 dan diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja dan kelangsungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Dikeluarkannya berbagai produk hukum dan program kebijakan pemerintah serta dilakukannya pengawasan terlaksananya produk hukum yang telah dikeluarkan untuk melindungi pekerja dalam kelangsungan hidup.

B. Saran

1. Dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, terhadap pekerja yaitu harus melakukan penyelesaian secara mediasi yang berarti dengan cara perundingan dan mencapai mufakat yaitu setelah mencapai mufakat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan seharusnya memberi solusi terhadap pekerja.
2. Perusahaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hendaknya lebih memperhatikan hak-hak apa yang harus didapatkan oleh pekerja, hak tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.